

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan cukai rokok bertingkat di Indonesia dalam merespons meningkatnya downtrading, yaitu pergeseran konsumsi dari produk SKM Tier I ke Tier II yang mengancam stabilitas penerimaan jangka panjang. Mengingat cukai hasil tembakau merupakan tulang punggung penerimaan negara bukan pajak yang menyumbang lebih dari 95 persen dari total penerimaan cukai nasional, pemahaman mengenai interaksi antara penyesuaian tarif dan kondisi ekonomi menjadi krusial dalam kerangka ekonomi publik dan kebijakan fiskal. Menggunakan data triwulan periode 2017–2024, penelitian ini menerapkan model Ordinary Least Squares (OLS) untuk menganalisis bagaimana PDB atas dasar harga berlaku memoderasi hubungan antara tarif cukai per tier dan penerimaan negara.

Temuan empiris menunjukkan adanya asimetri yang jelas antar tingkat. Kenaikan tarif cukai Tier I secara signifikan meningkatkan penerimaan negara, konsisten dengan ekspektasi teoretis mengenai permintaan yang relatif inelastis pada kategori rokok premium. Sebaliknya, peningkatan tarif cukai Tier II menunjukkan dampak non-linear yang mengindikasikan adanya substitusi menuju produk dengan harga lebih rendah, sekaligus menegaskan relevansi elastisitas silang dan dinamika kurva Laffer dalam struktur cukai bertingkat di Indonesia. Analisis moderasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kenaikan PDB memperkuat dampak positif reformasi tarif Tier I, sekaligus mengurangi konsekuensi negatif dari kenaikan tarif Tier II.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur cukai bertingkat yang kompleks dapat memperbesar distorsi pasar dan membatasi optimalisasi penerimaan negara. Hasil ini menegaskan urgensi harmonisasi tarif dan penyederhanaan struktur cukai guna menyelaraskan kebijakan cukai dengan tujuan fiskal nasional.

Kata Kunci: *Cukai Hasil Tembakau, Downtrading, Struktur Cukai Bertingkat, Kebijakan Fiskal, Penerimaan Negara, Kurva Laffer.*

FEB UNDIP